

PENYUSUNAN INDIKATOR KOMPOSIT PERLINDUNGAN ANAK

DIREKTORAT KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK
email: destri_h@bappenas.go.id

ABSTRAK

Kajian awal penyusunan indikator komposit perlindungan anak ditujukan untuk menyusun sebuah indeks komposit yang dapat menggambarkan kondisi anak dari aspek perlindungan khusus anak dan kualitas hidupnya. Output yang dihasilkan dari kajian ini adalah indeks tunggal dan indeks komposit terkait perlindungan khusus untuk anak dan kualitas hidup anak, indeks kemiskinan anak, indeks kesetaraan gender atau gender equality index (GEI), dan analisa tentang indikator ideal untuk perlindungan anak.

Kajian ini menggunakan metode analisis data sekunder dengan menggunakan sumber data dari hasil perhitungan Susenas 2009 (KOR dan Modul). Selain itu, kajian ini juga dilaksanakan melalui serangkaian workshop, FGD, dan seminar uji publik baik di tingkat pusat maupun daerah untuk mendapatkan masukan dari stakeholders terkait dengan perlindungan anak.

Dari kajian ini didapatkan perbandingan indeks komposit setiap provinsi terhadap indeks nasional. Semakin besar nilai indeks perlindungan khusus untuk anak di provinsi tertentu, berarti semakin besar pula permasalahan dan kebutuhan perlindungan anak di wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin besar indeks komposit kualitas hidup anak menandakan bahwa provinsi tersebut telah memiliki kualitas hidup anak yang baik sehingga permasalahan kualitas hidup anak di provinsi tersebut dapat dikatakan kecil. Provinsi yang memiliki permasalahan terbesar mengenai perlindungan anak di wilayah perkotaan adalah Maluku utara, sedangkan di wilayah pedesaan adalah NTB. Provinsi yang memiliki permasalahan kualitas hidup anak terbesar di daerah perkotaan adalah Gorontalo, sedangkan untuk wilayah pedesaan adalah Maluku.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, disampaikan beberapa rekomendasi, antara lain: penyusunan series indeks tunggal dan indeks komposit perlindungan khusus untuk anak dan indeks kualitas hidup anak, analisis kesejajaran ketersediaan data/informasi perlindungan anak dan perencanaan mekanisme pengumpulan datanya, perbaikan sistem dan mekanisme pengumpulan data dan informasi terkait anak yang ada di masing-masing kementerian/Lembaga, serta pengusulan indikator-indikator penting perlindungan anak yang belum tersedia datanya untuk dicakup dalam survei-survei BPS kedepan.

1. LATAR BELAKANG

Tujuan pembangunan perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam UU No. 23/ 2002, adalah terpenuhinya hak anak Indonesia untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, mendapat perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, perdagangan anak, dan diskriminasi. Dengan demikian, pemenuhan hak-hak anak mencakup berbagai bidang pembangunan (lintas bidang pembangunan).

Hingga saat ini, masih banyak masalah terkait anak baik dari segi kesehatan, gizi, pendidikan, perdagangan anak, maupun diskriminasi dan tindak kekerasan. Di bidang pendidikan, data Susenas menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah (APS) anak hanya mengalami sedikit peningkatan. Pada tahun 2008, APS usia 7–12 tahun, 13–15 tahun, dan 16–18 tahun, berturut-turut 97,83%, 84,41%, dan 54,70% meningkat menjadi 97,95%, 85,43%, dan 55,05% pada tahun 2009. Data Kemendiknas menyebutkan bahwa anak yang mengikuti pendidikan usia dini (APK PAUD) pada tahun 2009/10 mencapai 53,70 persen, meningkat dari tahun 2008/2009 sebesar 50,62 persen.

Di bidang kesehatan, menunjukkan bahwa angka kematian bayi (AKB) mengalami sedikit penurunan dari 35 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2003, menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Pada tahun yang sama, angka kematian balita (AKBa) menurun dari 46 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2003 menjadi 44 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Status gizi anak juga masih sangat rendah, terlihat dari prevalensi balita kurang gizi (berat badan kurang) sebesar 18,0%, dan 4,9% diantaranya dengan gizi buruk pada tahun 2010. Prevalensi balita pendek (stunting) sebesar 35,6% dan prevalensi balita kurus (wasting) adalah 13,3%. Cakupan imunisasi campak pada anak umur 12-23 bulan sebesar 74,5% pada tahun 2010 menurun dibandingkan tahun 2007 yakni sebesar 81,6%. Sementara proporsi penolong persalinan oleh tenaga kesehatan tahun 2010 sebesar 82,3% terlihat meningkat jika dibandingkan pada tahun 2007 yakni sebesar 75,4%.

Dari aspek perlindungan, perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan, perdagangan anak, eksploitasi, dan diskriminasi masih belum optimal. Berbagai permasalahan yang dihadapi antara lain jumlah pekerja anak yang relatif masih tinggi dan kejahatan dan eksploitasi terhadap pekerja anak, terutama pekerja anak yang berstatus sebagai buruh. Namun demikian, data mengenai pekerja anak masih beragam. Data Sakernas menunjukkan penurunan persentase pekerja anak usia 10-14 tahun, dari 5,52 persen pada tahun 2005 menjadi 4,65 persen pada tahun 2006 dan 3,78 persen pada tahun 2007.

Sedangkan Survei Pekerja Anak (SPA) tahun 2009 yang dilakukan oleh BPS dan ILO menunjukkan bahwa jumlah pekerja anak usia 10-17 tahun sebesar 3,7 juta orang atau sekitar 10 % dari 35,7 juta anak usia 10-17 tahun di Indonesia .

Dari sisi kepemilikan akte kelahiran, pada tahun 2007 hanya terdapat sekitar 56,4% anak balita yang sudah memiliki akte kelahiran . Tidak dimilikinya akte kelahiran dapat berdampak pada peluang terjadinya diskriminasi anak, seperti: tidak memiliki akses terhadap pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan; perdagangan anak; pekerja anak; dan menjadi korban kejahatan seksual.

Dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan perlindungan anak ke depan, diperlukan suatu indikator komposit yang dapat mencerminkan pemenuhan hak anak Indonesia, yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan lintas bidang yang terkait dengan perlindungan anak. Indikator tersebut harus dapat menggambarkan pemenuhan hak anak dari aspek hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang (kualitas hidup) serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (perlindungan khusus). Indikator tersebut juga harus akurat dan dapat diperbaharui secara berkala, sehingga dapat dijadikan sebagai baseline data untuk perumusan kebijakan pembangunan perlindungan anak ke depan. Hingga saat ini, indikator komposit yang memenuhi kriteria tersebut masih belum ada, dan belum ada benchmarking baik ditingkat nasional maupun internasional.

Mengingat pentingnya arti indeks komposit perlindungan anak, maka perlu dilaksanakan kajian untuk merumuskan indeks komposit perlindungan anak. Dengan adanya indeks komposit perlindungan anak, diharapkan pembangunan perlindungan anak akan lebih terintegrasi dan komprehensif. Selanjutnya dapat menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif dalam mewujudkan dunia yang layak bagi seluruh anak Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

2. TUJUAN KAJIAN

Kajian awal ini bertujuan untuk menyusun indeks komposit kualitas hidup anak dan indeks komposit perlindungan khusus untuk anak, dengan cara: 1) melakukan pemetaan terhadap data terkait perlindungan anak yang sudah ada; 2) menghitung dan menganalisis indeks tunggal, indeks komposit, dan indeks kesetaraan jender atau gender equality index (GEI) kualitas hidup anak, perlindungan khusus untuk anak, dan kemiskinan anak pada tingkat nasional dan provinsi, dan; 3) menyajikan hasil penghitungan/analisis di tingkat pusat dan provinsi terpilih.

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada penentu kebijakan dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan anak. Selain itu, dapat dijadikan sebagai acuan untuk membentuk indeks komposit perlindungan anak yang lebih komprehensif, dengan didukung oleh data yang tersedia secara komprehensif dan berkesinambungan.

Adapun output yang diharapkan dari kajian ini adalah: 1) terbentuknya indeks tunggal kualitas hidup anak dan perlindungan khusus untuk anak pada tingkat nasional dan provinsi; 2) terbentuknya indeks komposit kualitas hidup anak dan perlindungan khusus untuk anak berdasarkan data KOR Susenas 2009, Modul Susenas 2009, dan KOR + Modul Susenas 2009; 3) terbentuknya Gender Equality Indexes (Indeks Kesetaraan gender); dan 4) tersusunnya rekomendasi dalam merancang penyediaan data perlindungan anak yang komprehensif, yang mencakup indikator ideal dari indeks komposit perlindungan anak, terutama dari aspek perlindungan khusus.

Ruang lingkup penyusunan indeks komposit perlindungan anak ini meliputi: 1) pemetaan dan analisis terhadap indikator dan data perlindungan anak yang telah tersedia; 2) penentuan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk menyusun indeks komposit perlindungan anak; 3) penyusun dan penyajian indeks tunggal, indeks komposit, Gender Equity Index (GEI) kualitas hidup anak, perlindungan khusus untuk anak, dan kemiskinan anak; dan 4) serta penyelenggaraan Workshop, Round Table Discussion, dan Seminar untuk menjaring masukan dari berbagai stakeholders terkait.

3. METODOLOGI

3.1 KERANGKA ANALISIS

Berdasarkan hasil kajian literatur terhadap beberapa indikator yang digunakan untuk kesejahteraan anak baik di dalam maupun di luar negeri, maka dapat dirumuskan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk membentuk indeks komposit perlindungan khusus untuk anak dan kualitas hidup anak. Penentuan indikator yang membangun indeks komposit tersebut disesuaikan dengan ketersediaan data. Sumber data yang dipilih memuat indikator perlindungan anak yang komprehensif dan dapat digunakan secara berkesinambungan, yaitu Susenas 2009, baik KOR atau MODUL. Indikator yang digunakan untuk membentuk indeks komposit perlindungan khusus untuk anak dan kualitas hidup anak adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator-indikator KOR dan MODUL Susenas 2009 Pembentuk Indeks Komposit Perlindungan Khusus untuk Anak dan Kualitas Hidup Anak

INDEKS KOMPOSIT	INDIKATOR	
	KOR	MODUL
Perlindungan Khusus Untuk Anak	Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan
	Kejahatan	Kecacatan
	Usia kawin pertama	Identitas Pengasuhan

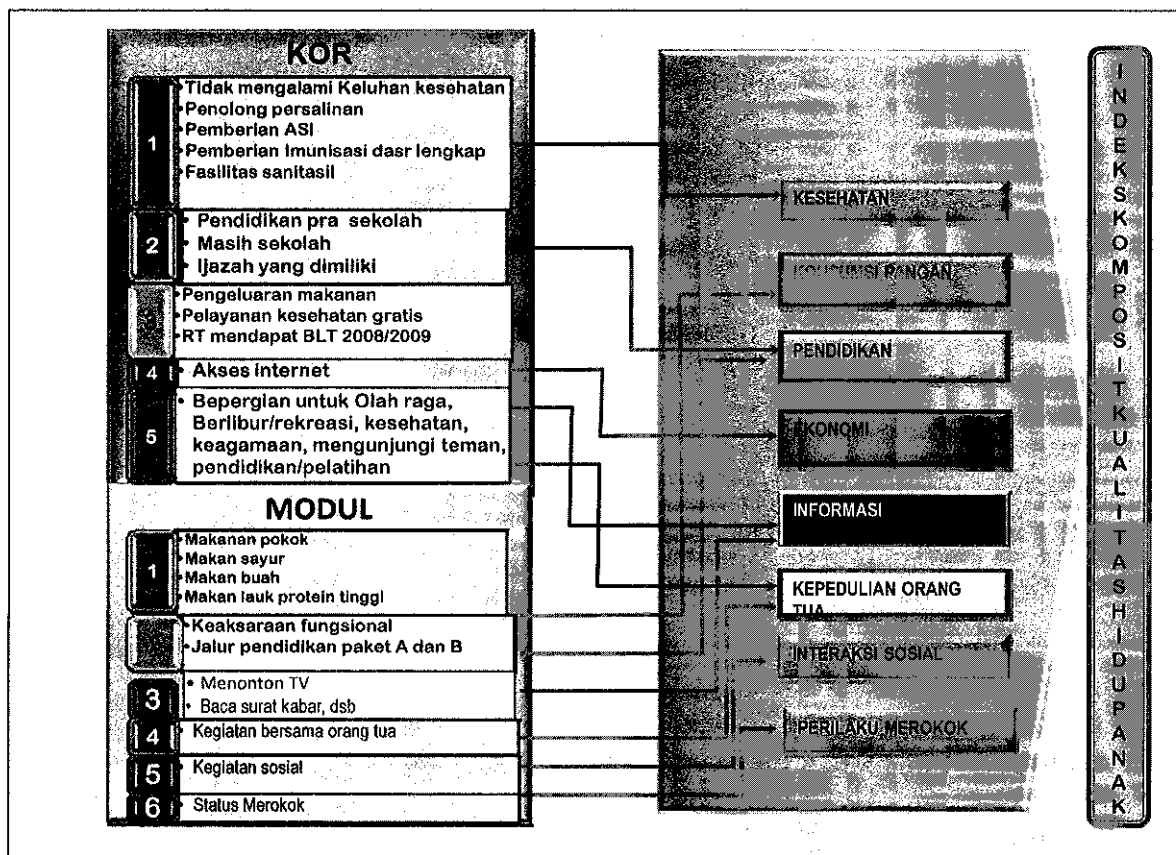
Tabel 1. Indikator-indikator KOR dan MODUL Susenas 2009 Pembentuk Indeks Komposit Perlindungan Khusus untuk Anak dan Kualitas Hidup Anak

INDEKS KOMPOSIT	INDIKATOR	
	KOR	MODUL
Kualitas Hidup Anak	Kesehatan	Konsumsi Pangan
	Pendidikan	Pendidikan
	Ekonomi	Perilaku merokok
	Informasi	Informasi
	Kepedulian Orang tua	Kepedulian Orang tua
		Interaksi sosial

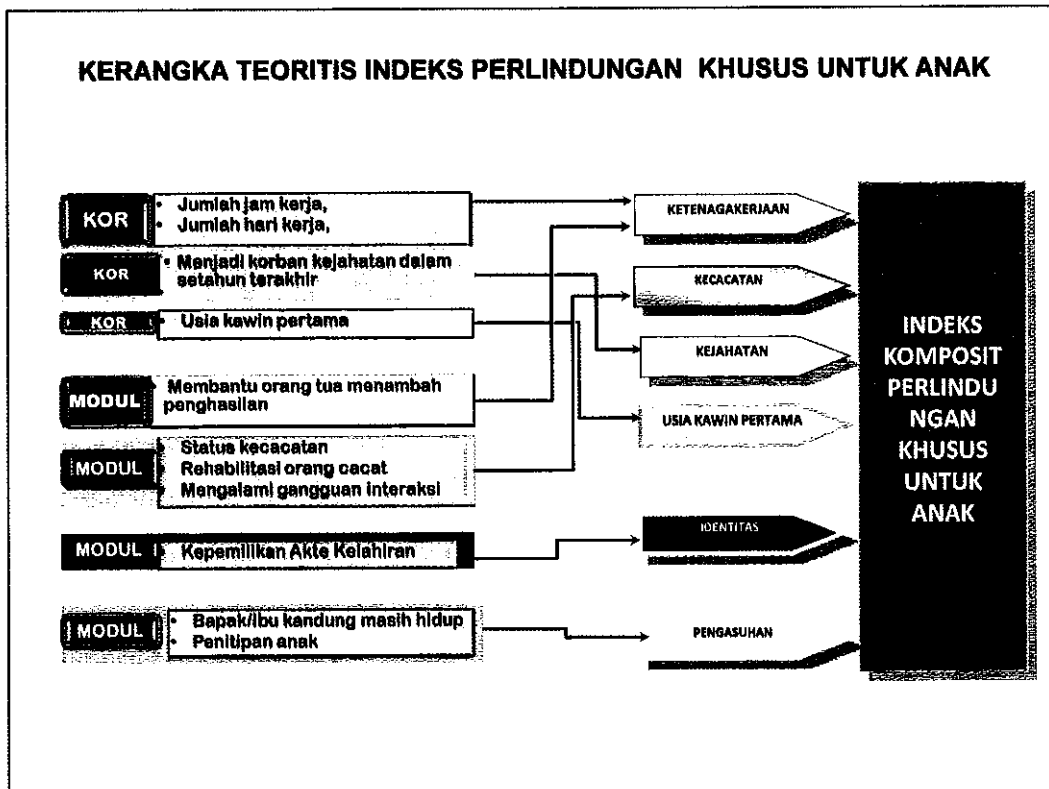
Sumber: Susenas 2009

Indeks komposit perlindungan khusus untuk anak tidak disatukan dengan indeks komposit kualitas hidup anak. Hal ini dengan pertimbangan bahwa dari segi statistik indeks perlindungan khusus anak berbeda arahnya dengan indeks kualitas hidup anak. Semakin tinggi nilai indeks perlindungan khusus untuk anak, semakin tinggi masalah perlindungan anak di wilayah tersebut. Sementara itu, semakin tinggi indeks kualitas hidup anak, semakin baik kualitas anak di wilayah tersebut. Selain itu, indeks kualitas hidup anak mencerminkan indikator yang melekat pada anak, sedangkan indeks perlindungan khusus untuk anak mencerminkan bahwa anak merupakan korban dari tindakan orang lain, misalnya dalam hal anak yang menjadi korban kejahatan.

Pada Gambar 1 sampai 2, berturut-turut disajikan kerangka teoritis indeks komposit kualitas hidup anak dan perlindungan khusus untuk anak.

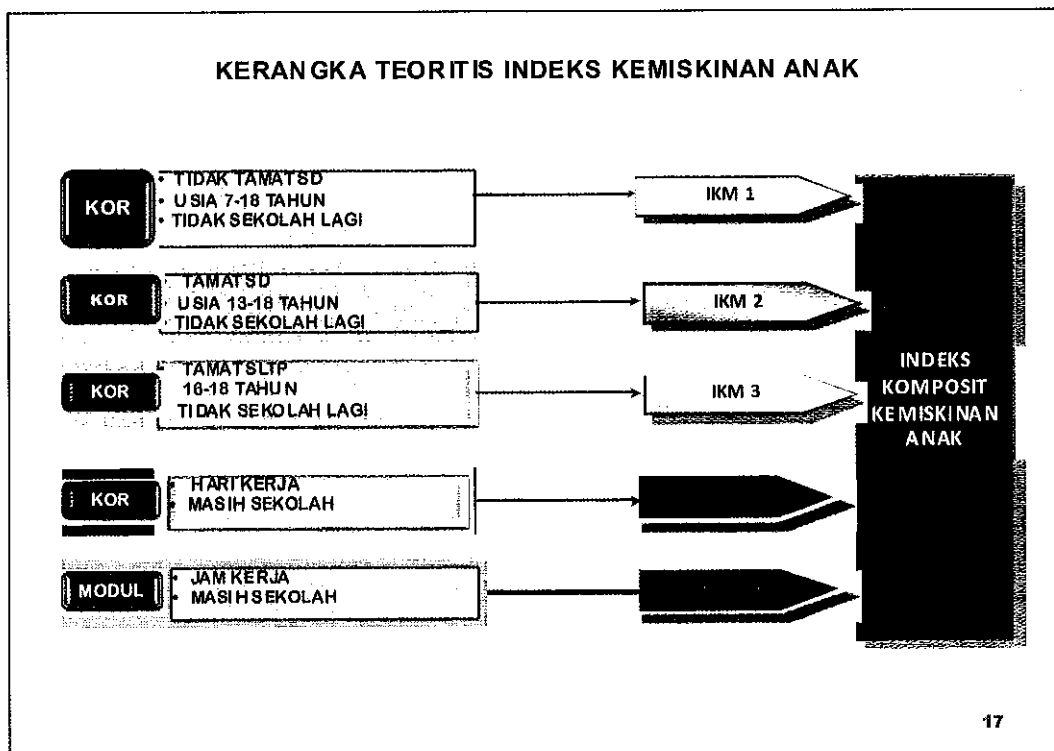


Gambar 1. Kerangka Teoritis Indeks Komposit Kualitas Hidup Anak



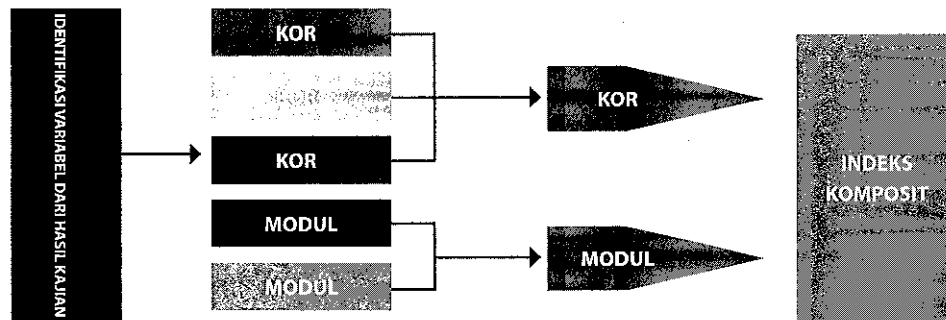
Gambar 2. Kerangka Teoritis Indeks Komposit Perlindungan Khusus Untuk Anak

Selain dua indeks komposit tersebut diatas, kajian ini juga menghitung indeks kemiskinan anak yang dilihat dari aspek pendidikannya. Dalam hal ini semakin besar indeks kemiskinan anak, maka semakin besar pula potensi kemiskinan anak tersebut dimasa yang akan datang. Berikut disajikan kerangka analisis indeks komposit kemiskinan anak.



Gambar 3. Kerangka Teoritis Indeks Komposit Kemiskinan Anak

Gambar 4 adalah kerangka analisis indeks komposit perlindungan khusus untuk anak dan kualitas hidup anak. Indikator yang berasal dari KOR dibedakan dengan indikator yang berasal dari MODUL. Hal ini untuk memudahkan dalam menyusun indeks komposit yang berkesinambungan. Indikator dari KOR digunakan untuk jangka waktu tahunan karena data KOR dikumpulkan setiap tahun. Sedangkan indikator dari MODUL digunakan untuk jangka waktu 3 tahunan karena MODUL yang sama akan berulang setiap tiga tahun sekali.



Gambar 4. Kerangka Analisis Pembentukan Indeks Komposit

Indikator – indikator yang digunakan pada kajian ini masih jauh dari sempurna, terutama kaitannya dengan ketersediaan data survey yang minimal. Indeks komposit perlindungan khusus terhadap anak yang ada dalam kajian ini belum bisa menggambarkan keseluruhan kondisi perlindungan anak di Indonesia terutama terkait dengan bidang kekerasan. Di dalam Susenas 2009 tidak terdapat indikator mengenai kekerasan terhadap anak sehingga dalam indeks perlindungan khusus terhadap anak, faktor kekerasan tidak diikutsertakan. Selain itu, indeks komposit ini hanya dapat dihitung setiap tiga tahun sekali dikarenakan MODUL Susenas mengenai sosial budaya dan pendidikan hanya dilaksanakan per-tiga tahun.

Walaupun demikian, keunggulan dari indikator yang dipilih dalam kajian ini adalah indikator tunggal yang tercantum di dalam KOR Susenas dapat dihitung setiap tahun, dengan demikian dapat dilihat tren nya.

3.2 METODE PELAKSANAAN KAJIAN

Selain analisis data sekunder, dalam kajian ini pun dilakukan serangkaian pertemuan dalam bentuk workshop, roundtable discussion, dan serangkaian seminar di pusat dan daerah dengan kementerian/lembaga terkait, para pakar, perguruan tinggi, LSM, lembaga donor, masyarakat, dll. Hal ini ditujukan untuk membahas konsep penyusunan indeks komposit perlindungan anak dan hasil perhitungannya, serta mendapatkan input untuk penyempurnaan dan hasil tersebut. Dengan demikian hasil kajian penyusunan indeks komposit perlindungan anak menjadi komprehensif sesuai dengan yang diharapkan.

Kegiatan seminar di daerah dilakukan di dua provinsi yaitu Bali dan Jawa Timur. Melalui kegiatan ini diperoleh masukan yang sangat berharga untuk penyempurnaan indeks komposit perlindungan anak, mengingat masukan tersebut didasarkan pada kondisi yang terjadi di lapangan. Pada seminar di daerah, selain disajikan hasil nasional dan provinsi, juga ditambah dengan hasil indeks untuk provinsi yang bersangkutan yang dirinci menurut kabupaten/kota.

3.3 DATA

Data yang digunakan adalah data Susenas 2009 (KOR dan Modul). Pertimbangannya antara lain adalah: Susenas merupakan data yang tersedia sampai saat ini, memuat indikator-indikator perlindungan anak yang relatif lebih lengkap dan cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan sumber data lainnya, serta data tersedia setiap tahun untuk KOR dan setiap tiga tahun sekali untuk MODUL. Dengan demikian, diharapkan indikator komposit perlindungan anak dapat diperbaharui secara berkala setiap 1 atau 3 tahun.

4. HASIL KAJIAN DAN ANALISIS

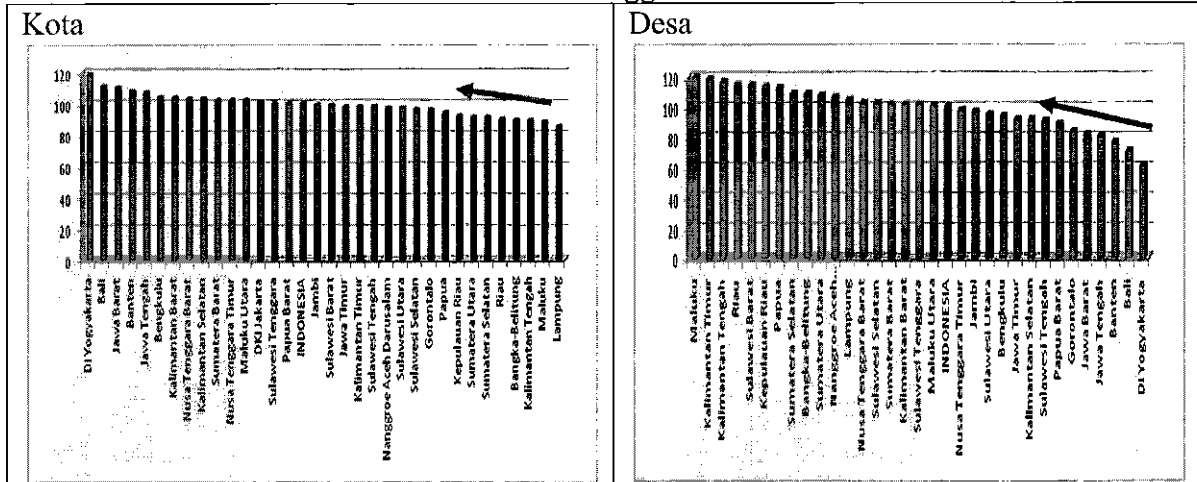
4.1 INDEKS TUNGGAL

Indeks Tunggal Kualitas Hidup Anak, dibentuk dari banyak indikator. Semakin tinggi nilai indeks tunggal kualitas hidup anak menunjukkan semakin tingginya kualitas hidup anak. Salah satu contoh indeks tunggal kualitas hidup anak terkait dengan anak balita (bawah lima tahun) yang pernah diberi ASI. Semakin tinggi nilai indeks tunggal anak balita yang pernah diberi ASI, berarti semakin banyak anak balita yang pernah diberi ASI.

Di perkotaan, 5 provinsi yang mempunyai indeks tunggal anak balita pernah diberi ASI tertinggi, yaitu DI Yogyakarta, Bali, Jawa Barat, Banten dan Jawa Tengah. Sedangkan 5 provinsi yang perlu mendapat perhatian dengan nilai indeks terendah yaitu Lampung, Maluku, Kalimantan Tengah, Bangka Belitung dan Riau. Dilihat dari segi indeks kesetaraan jender atau Gender Equality Indexes (GEI), Provinsi DI Yogyakarta dan Maluku memiliki tingkat kesenjangan tertinggi, yaitu 2,6 dan 0,5. Nilai GEI 2,6 di DI Yogyakarta berarti anak balita perempuan mempunyai peluang diberi ASI 2,6 kali anak balita laki-laki. Provinsi dengan nilai GEI sama atau mendekati satu yaitu Jawa Tengah dan Sumatera Barat. Artinya tidak ada perbedaan peluang anak balita perempuan dan laki-laki diberi ASI.

Di perdesaan, Provinsi DI Yogyakarta justru mempunyai nilai indeks tunggal anak balita pernah diberi ASI paling rendah, diikuti oleh provinsi Bali, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Hal ini dinilai kurang masuk akal dan harus diteliti secara bijaksana. Hal ini tidak sesuai dengan perhitungan lain dimana provinsi DI Yogyakarta memiliki hasil perhitungan yang cenderung baik, dengan demikian diperlukan pengalihan informasi yang lebih mendalam lagi untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Disisi lain, nilai GEI paling tinggi adalah Gorontalo (1,59) dan GEI paling rendah sebesar 0,66 di Provinsi Bali (0,66). Provinsi dengan nilai GEI sama atau mendekati satu adalah Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat, dan Jawa Timur.

Gambar 4. Indeks Tunggal Pemberian ASI Eksklusif

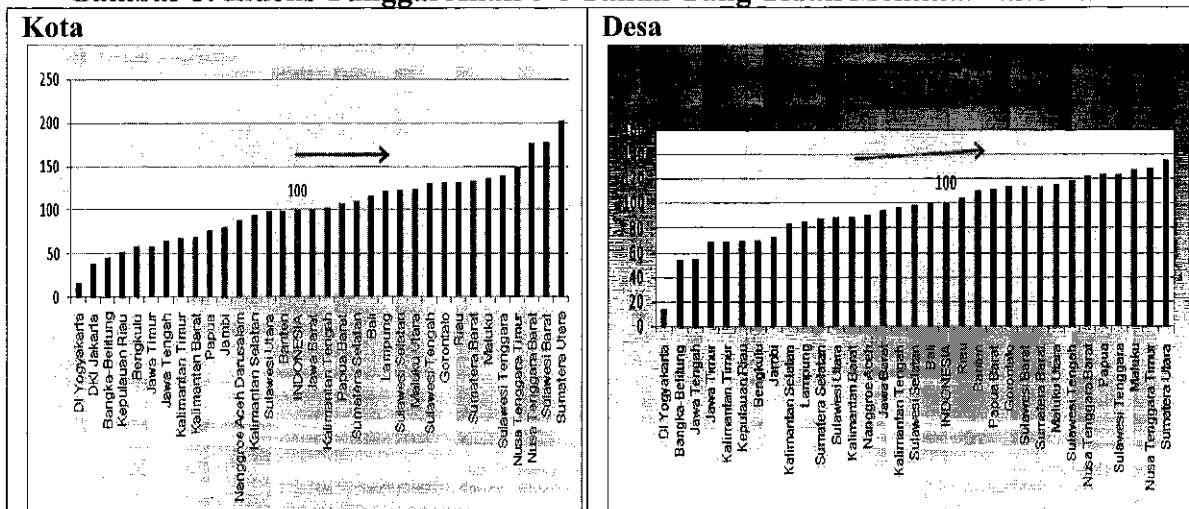


Gambar 4. Indeks Tunggal Pemberian ASI Eksklusif

Indeks Tunggal Perlindungan Khusus Untuk Anak, juga dibentuk dari banyak indikator. Kebalikan dari indeks tunggal kualitas hidup anak, nilai indeks perlindungan khusus untuk anak yang semakin tinggi, menunjukkan semakin banyak anak-anak yang mengalami berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan salah. Sebagai contoh berikut ini adalah gambaran mengenai indeks tunggal kepemilikan akte kelahiran anak usia 0-6 tahun.

Di perkotaan, provinsi dengan nilai indeks terendah atau masalah kepemilikan akte lahir tertinggi adalah Sumatera Utara. Selanjutnya Provinsi Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tenggara. Sedangkan provinsi dengan ranking tertinggi atau anak 0-6 tahun yang tidak memiliki akte kelahiran paling sedikit adalah DI Yogyakarta. Nilai GEI di perkotaan antara 0,73 sampai dengan 1,35. Kalimantan Tengah mempunyai GEI paling rendah dalam hal kepemilikan akte kelahiran sedangkan GEI paling tinggi adalah Kepulauan Riau yaitu 1,35. Provinsi yang mempunyai nilai GEI akte kelahiran sekitar 1, menunjukkan anak laki-laki dan perempuan mempunyai peluang/resiko yang sama untuk memiliki akte kelahiran, yaitu Aceh dan Sulteng.

Gambar 5. Indeks Tunggal Anak 0-6 Tahun Yang Tidak Memiliki Akte Lahir



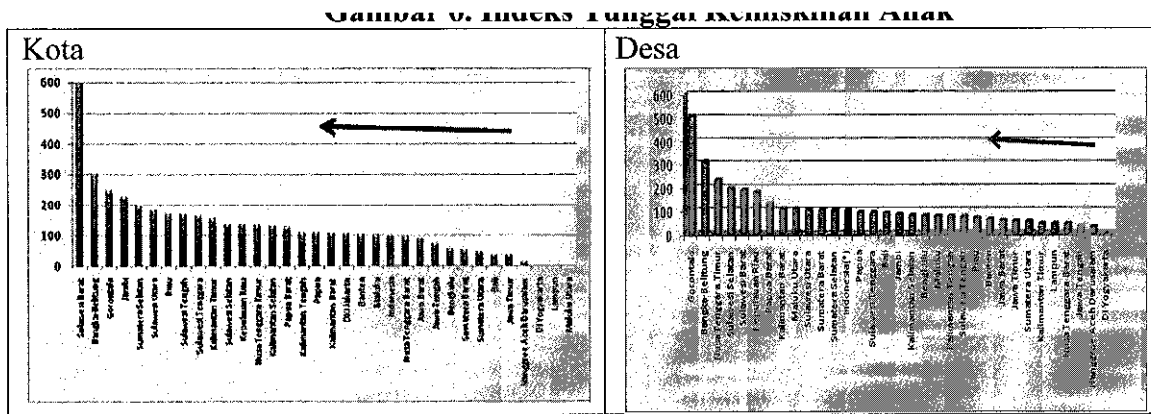
Gambar 5. Indeks Tunggal Anak 0-6 Tahun Yang Tidak Memiliki Akte Lahir

Di perdesaan, provinsi yang paling bermasalah dalam hal akte kelahiran juga Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disusul oleh Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi Tenggara, dan Papua. Nilai GEI paling tinggi adalah di Provinsi DI Yogyakarta (1,30) dan terendah di Papua (0,87). Artinya anak perempuan dan laki-laki mempunyai peluang berbeda untuk memiliki akte

kelahiran. Sementara provinsi dengan nilai GEI sama atau hampir sama dengan satu yaitu Kep. Riau, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Timur.

Indeks Tunggal Kemiskinan Anak, juga dibentuk dari beberapa indikator. Sebagai contoh disajikan gambaran mengenai Indeks Tunggal Kemiskinan Anak-1 (anak usia 7-18 tahun yang tidak tamat SD/ sederajat dan tidak sekolah lagi). Semakin tinggi nilai Indeks Tunggal Kemiskinan Anak-1 berarti semakin banyak jumlah anak usia 7-18 tahun yang tidak tamat SD/ sederajat dan tidak sekolah lagi.

Dari Gambar 6 dapat dilihat bahwa provinsi paling bermasalah dengan indeks kemiskinan anak di perkotaan adalah Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya Provinsi Bangka Belitung, Gorontalo, Jambi, dan Sumatera Selatan. Di perdesaan, provinsi yang mempunyai masalah terkait kemiskinan anak paling banyak terdapat di Provinsi Gorontalo. Provinsi lainnya yang termasuk tinggi yaitu Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat.



Sumber: Susenas 2009

Gambar 6. Indeks Tunggal Kemiskinan Anak

Di perkotaan, Provinsi Jawa Timur mempunyai GEI tertinggi yaitu 3,7 yang berarti bahwa anak perempuan berpeluang mempunyai masalah kemiskinan anak sebesar 3,7 kali anak laki-laki. Provinsi dengan nilai GEI sama atau mendekati 1 (satu), yaitu Bengkulu dan Gorontalo. Hal ini berarti anak laki-laki dan perempuan mempunyai peluang yang sama untuk mengalami kemiskinan anak. Di perdesaan, nilai GEI paling tinggi di Papua (1,98). Sedangkan provinsi dengan nilai GEI hampir satu yaitu Bengkulu.

4.2 INDEKS KOMPOSIT

Tabel 2 menunjukkan rangkuman hasil perhitungan indeks komposit kualitas hidup anak, perlindungan khusus untuk anak, dan kemiskinan anak.

Tabel 2. Rangkuman Hasil Perhitungan Indeks Komposit Perlindungan Anak

Rang	Indeks komposit kualitas hidup anak						Indeks komposit perlindungan khusus untuk anak						Indeks komposit kemiskinan anak														
	KOR		MODUL		KOR+MODUL		KOR		MODUL		KOR+MODUL		Kota	Desa													
	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa													
5 TERTINGGI														5 TERENDAH													
1.	DKI Jakarta	DI Yogyakarta	DI Yogyakarta	Papua	DI Yogyakarta	Papua	Kalsel	Kalsel	Jambi	DI Yogyakarta	Babel	DI Yogyakarta	Lampung	DI Yogyakarta													
2.	Banten	Sumbar	DKI Jakarta	NTT	DKI Jakarta	NTT	Papua	Jabar	Bengkulu	Jateng	DKI Jakarta	Babel	DI Yogyakarta	NAD													
3.	DI Yogyakarta	Kaltim	Jatim	Papua Barat	Jatim	Papua Barat	Kalteng	Banten	Babel	Babel	Bengkulu	Kaltim	Maluku Utara	Jateng													
4.	Sumbar	Jatim	Kaltim	NTB	Kaltim	NTB	Bengkulu	Kalteng	Sumbar	Jambi	Kep. Riau	Jambi	NAD	NTB													
5.	Kaltim	Jateng	Bali	Maluku	Bali	Maluku	Banten	Babel	Bali	Kep. Riau	DI Yogyakarta	Jateng	Jatim	Lampung													
5 TERENDAH														5 TERTINGGI													
34.	Sulteng	Maluku	Sulbar	DI Yogyakarta	Sulbar	DI Yogyakarta	NTB	NTT	Papua Barat	Sumut	Maluku Utara	NTB	Sulawesi Barat	Gorontalo													
33.	Gorontalo	NTT	Sulteng	Sulut	Sulteng	Sulut	Papua Barat	Sumut	Maluku Utara	Papua	Sulbar	NTT	Bangka Belitung	Bangka Belitung													
32.	NTT	Papua Barat	Maluku	Sumbar	Maluku	Sumbar	Jambi	Maluku	Maluku	Papua Barat	NTB	Papua	Gorontalo	Nusa Tenggara Timur													
31.	Maluku	Maluku Utara	Maluku Utara	Bali	Maluku Utara	Bali	Kalbar	NTB	Papua	Sultra	Papua Barat	Sumut	Jambi	Sulawesi Barat													
30.	Sulbar	Papua	Papua Barat	Jatim	Papua Barat	Jatim	Sumbar	NAD	Sulbar	Maluku	Maluku	Maluku	Sumatera Selatan	Sulawesi Selatan													

Sumber: Pengolahan Hasil Susenas 2009

Indeks Komposit Kualitas Hidup Anak. Nilai indeks komposit kualitas hidup anak yang semakin tinggi menunjukkan bahwa kualitas hidup anak semakin baik. Selanjutnya, semakin tinggi indeks kualitas hidup di suatu wilayah maka rakingnya semakin kecil dan demikian pula sebaliknya.

Berdasarkan data KOR, Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan nilai indeks komposit kualitas hidup tertinggi untuk daerah perkotaan. Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa DKI Jakarta merupakan ibu kota Negara sehingga berbagai fasilitas pendidikan dan kesehatan kondisinya lebih baik dibandingkan provinsi lainnya. Selanjutnya disusul oleh Provinsi Banten, DI Yogyakarta, Sumatera Barat dan Kalimantan Timur. Sementara provinsi dengan indeks komposit kualitas hidup anak terendah adalah Provinsi Sulawesi Tengah, diikuti oleh Provinsi Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Sulawesi Barat. Kelima provinsi tersebut perlu perhatian dalam hal peningkatan kualitas hidup anak. Di perdesaan, 5 provinsi dengan indeks kualitas hidup tertinggi berturut-turut, adalah DI Yogyakarta, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Provinsi dengan nilai indeks kualitas hidup terendah di perdesaan yaitu Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Maluku Utara, dan Papua. Dengan demikian provinsi tersebut perlu mendapat perhatian dalam peningkatan kualitas hidup anak.

Indeks komposit kualitas hidup anak yang dihitung berdasarkan data MODUL menunjukkan bahwa di daerah perkotaan, Provinsi DI Yogyakarta kembali mempunyai indeks kualitas hidup paling tinggi dan diikuti oleh Provinsi DKI Jakarta, Jatim, Kaltim, dan Bali. Sedangkan Provinsi Sulawesi Barat mempunyai nilai indeks kualitas hidup terendah, diikuti oleh provinsi Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat. Di perdesaan, nilai indeks terendah berturut-turut terdapat di DI Yogyakarta, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Bali dan Jawa Timur. Hal ini kurang masuk akal, mengingat bahwa pada umumnya kondisi kualitas hidup anak di wilayah Indonesia bagian barat lebih baik dibandingkan Indonesia bagian timur. Oleh sebab itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai penyebab dari kondisi tersebut.

Sedangkan menurut Indikator komposit kualitas hidup anak yang dihitung berdasarkan KOR dan MODUL, di daerah perkotaan, lima provinsi di bagian timur Indonesia menduduki nilai indeks kualitas hidup anak paling rendah. Kelima provinsi tersebut berturut-turut dari yang tertendah yaitu Sulbar, Sulteng, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat. Sedangkan lima provinsi dengan indeks komposit tertinggi sebagian besar berada di Indonesia bagian Barat, yaitu DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jatim, Kaltim, dan Bali. Sementara untuk perdesaan, kondisinya kurang masuk akal karena nilai indeks terendah berada di wilayah Indonesia bagian barat, yaitu DI Yogyakarta, Sulut, Sumbang, Bali, dan Jatim. Sebaliknya, indeks tertinggi berada di wilayah Indonesia timur, berturut-turut Papua, NTT, Papua Barat, NTB, dan Maluku. Hal ini berarti kualitas hidup anak di perdesaan Indonesia bagian timur lebih baik dibandingkan kualitas hidup anak di perdesaan Indonesia bagian barat. Dengan demikian, penjelasan dari kondisi ini juga perlu digali lebih lanjut.

Indeks Komposit Perlindungan Khusus Anak. Semakin tinggi nilai indeks perlindungan anak, berarti perlindungan anak dari kekerasan, penelantaran, dan segala bentuk perlakuan salah lainnya semakin rendah, atau dengan kata lain kasus-kasus kekerasan terhadap anak semakin tinggi. Dalam hal ini semakin tinggi nilai indeks perlindungan khusus untuk anak di suatu wilayah maka semakin tinggi pula rakingnya.

Indeks komposit perlindungan khusus untuk anak yang dihitung berdasarkan KOR, di perkotaan, menunjukan bahwa provinsi dengan nilai indeks tertinggi berturut-turut, adalah Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Jambi, Kalimantan Barat dan Sumatera Barat. Sementara untuk perdesaan, lima provinsi yang perlu mendapat perhatian dalam perlindungan anak yaitu Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Aceh. Provinsi yang nilai indeks perlindungannya paling rendah baik di perkotaan maupun perdesaan adalah Kalimantan Selatan. Selain itu, Provinsi Kalimantan Tengah dan Banten konsisten masuk dalam 5 provinsi yang memiliki indeks komposit perlindungan khusus untuk anak terkecil.

Indeks komposit perlindungan khusus untuk anak yang dihitung dari MODUL, di perkotaan, provinsi dengan nilai indeks perlindungan anak tertinggi yaitu Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua, dan Sulawesi Barat. Sementara untuk perdesaan, provinsi yang memerlukan perlindungan anak yang tinggi yaitu Sumatera Utara, Papua, Papua Barat, Sulawesi Tenggara dan Maluku. Dengan demikian provinsi tersebut perlu mendapat perhatian dalam perlindungan anak. Sementara itu, 5 provinsi yang kondisi perlindungan anaknya terbaik semuanya berada di wilayah Indonesia bagian barat, baik di perkotaan maupun perdesaan.

Menurut indeks komposit perlindungan khusus untuk anak yang dihitung melalui KOR dan MODUL, di perkotaan, nilai indeks komposit perlindungan anak paling tinggi terdapat di provinsi Maluku Utara, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat dan Maluku. Berarti kelima provinsi tersebut perlu mendapat perhatian dalam perlindungan anak. Sementara untuk daerah perdesaan, provinsi yang perlu mendapat perhatian dalam hal perlindungan anak yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Sumatera Utara, dan Maluku.

Indeks Komposit Kemiskinan Anak. Semakin tinggi nilai indeks kemiskinan anak berarti semakin banyak anak usia 7-18 tahun yang tidak tamat SD/ sederajat atau tidak bersekolah lagi, anak usia 13-18 tahun yang tidak tamat SMP/ sederajat atau tidak sekolah lagi, dan anak usia 16-18 tahun yang tidak tamat SMA/ sederajat atau tidak sekolah lagi. Dimasa depan, anak-anak ini berpotensi menjadi miskin juga jika tidak diberi pendidikan kecakapan hidup, karena sebagian besar berasal dari keluarga miskin dan mereka tidak sekolah atau putus sekolah.

Di perkotaan, provinsi yang mempunyai nilai indeks kemiskinan anak tertinggi adalah Sulawesi Barat, Bangka Belitung, Gorontalo, Jambi dan Sumatera Selatan. Dengan demikian di kelima provinsi tersebut perlu perhatian khusus terhadap pendidikan dan status bekerja anak. Sementara untuk daerah perdesaan provinsi dengan nilai indeks kemiskinan tertinggi adalah Gorontalo, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Sedangkan provinsi dengan indeks kemiskinan anak terendah adalah Provinsi Lampung untuk daerah perkotaan dan Provinsi DI Yogyakarta untuk daerah perdesaan.

Hasil perhitungan indeks komposit baik kualitas hidup anak maupun perlindungan khusus anak ini dapat dijadikan bahan komparasi yang menggambarkan kondisi perlindungan anak di seluruh provinsi. Namun, hasil perhitungan ini tidak dapat secara langsung dapat digunakan dalam membuat kebijakan karena harus di crosscheck kepada daerahnya agar mendapatkan gambaran yang utuh tentang kondisi perlindungan pada masing-masing provinsi. Dalam penyusunan kebijakan diperlukan justifikasi dari para ahli sesuai dengan pengalamannya.

4.3 ANALISIS KESENJANGAN INDIKATOR ANTARA INDIKATOR IDEAL DAN YANG TERSEDIA

Meskipun sudah banyak indikator yang digunakan terkait anak, baik di dalam maupun di luar negeri, namun belum ada benchmarking dalam membentuk indeks komposit perlindungan anak. Dengan demikian belum ada kesepakatan tentang indikator-indikator yang digunakan.

Di Indonesia, perlindungan anak sudah diatur secara lengkap dalam UU Nomor 23 Tahun 2002, maka idealnya perlindungan anak harus mengacu pada undang-undang tersebut. Dalam undang-undang tersebut disampaikan bahwa perlindungan anak menyangkut berbagai kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sesuai undang-undang tersebut dan pertimbangan secara statistik, maka indeks perlindungan anak dibagi menjadi 2 bagian, yaitu: (1) indikator hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi (kualitas hidup); dan (2) indikator perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi (perlindungan khusus).

Indikator kualitas hidup anak sebagian besar terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Indikator-indikator yang digunakan umumnya sudah lengkap dan disepakati, sumber datanya sudah tersedia, dan pengumpulan datanya juga sudah dilaksanakan secara periodik. Sedangkan indikator perlindungan khusus untuk anak masih belum lengkap, data masih tersebar, sumber data yang komprehensif belum tersedia, dan pengumpulan data belum dilaksanakan secara rutin.

Indikator perlindungan khusus untuk anak yang datanya belum tersedia secara lengkap karena indikator dan sumber pendataannya belum disepakati, antara lain:

1. Anak dalam situasi darurat;
2. Anak berhadapan dengan hukum;
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
5. Anak yang diperdagangkan;
6. Anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza);
7. Anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental;
8. Anak penyandang cacat; dan
9. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 KESIMPULAN

Penyusunan Indikator Komposit Perlindungan Khusus untuk Anak dan Kualitas Hidup Anak belum memiliki benchmarking secara internasional, sehingga belum ada acuan baku dalam penyusunannya. Beberapa indikator untuk membentuk indeks terkait dengan anak masih beragam, baik di dalam maupun di luar negeri. Sehingga diperlukan penelaahan lebih lanjut terhadap indikator tersebut dan dikaitkan dengan ketersediaan datanya.

Dalam kajian awal indeks komposit perlindungan anak ini, digunakan data Susenas tahun 2009 dengan mempertimbangkan cakupan, kesinambungan dan ketersediaan data pada saat ini. Data Susenas memuat banyak indikator mengenai perlindungan anak dan kualitas hidup anak, serta pengumpulan datanya dapat dilakukan setiap tahun melalui data KOR dan tiga tahun sekali untuk data MODUL. Namun data ini juga mempunyai keterbatasan, karena tidak semua indikator yang diperlukan untuk menyusun indeks komposit perlindungan anak dan kualitas hidup anak tersedia. Selain itu, jika indikator tersebut berada dalam data MODUL maka indikator yang diperlukan tersebut tidak dapat disediakan pada setiap tahun.

Indeks komposit perlindungan khusus untuk anak merupakan kajian awal terhadap berbagai indikator dan data yang tersedia, dan belum merupakan indeks komposit perlindungan anak yang ideal. Dari hasil kajian ini diusulkan beberapa indikator yang penting untuk pembentukan indeks komposit perlindungan anak yang ideal tersebut dan selanjutnya perlu disepakati oleh kementerian/lembaga terkait.

Tahap awal kajian ini menghasilkan indeks komposit perlindungan khusus untuk anak, dan indeks kemiskinan anak yang merupakan bagian dari indeks komposit perlindungan khusus anak. Semakin tinggi nilai indeks komposit perlindungan khusus untuk anak maupun indeks komposit kemiskinan anak, merupakan gambaran semakin tinggi masalah perlindungan khusus untuk anak maupun kemiskinan anak. Selain itu, dihasilkan juga indeks kualitas hidup anak untuk melihat kualitas sumber daya manusia. Anak adalah aset bangsa yang perlu memiliki kualitas hidup yang baik untuk kehidupan selanjutnya. Semakin rendah kualitas hidup anak, semakin tinggi permasalahan terkait dengan kualitas hidup anak.

Indeks komposit yang dihasilkan dalam kajian awal ini, tidak dapat digunakan untuk mengambil kebijakan, namun dapat digunakan untuk melihat perbandingan atau perbedaan relatif, baik antar provinsi maupun antara provinsi tertentu dengan indeks nasional. Sedangkan kebijakan yang diambil dari data, didasarkan pada kesepakatan dan kondisi wilayah masing-masing.

5.2 REKOMENDASI

Beberapa saran atau rekomendasi dari hasil kajian ini adalah:

1. Untuk Bappenas:
 - a. Mensosialisasikan hasil perhitungan indeks tunggal/komposit perlindungan khusus untuk anak dan indeks kualitas hidup anak kepada Kementerian/Lembaga terkait sebagai masukan untuk menyempurnakan kegiatan/program pembangunan anak.
 - b. Membuat series indeks tunggal dan indeks komposit perlindungan khusus untuk anak dan indeks kualitas hidup anak.
 - c. Mendiskusikan dan membuat kesepakatan dengan kementerian/lembaga terkait tentang Indikator ideal yang akan digunakan untuk menghitung indeks komposit perlindungan khusus untuk anak dan indeks komposit kualitas hidup anak.
 - d. Menganalisis kesejangan ketersediaan data/informasi perlindungan anak, dan merencanakan mekanisme pengumpulan datanya.
 - e. Mengkoordinasikan Kementerian Lembaga untuk menyediakan data terkait anak secara berkesinambungan dengan cakupan yang cukup luas.
 - f. Mengidentifikasi dan mengusulkan indikator-indikator penting perlindungan anak untuk dicakup dalam survei-survei BPS yang sudah ada.
2. Untuk Kementerian/Lembaga (seperti: Kemensos, Kemenkes, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepolisian, Kemendiknas, Kementerian Agama, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, KPAI, PT, dsb):
 - a. Mensosialisasikan indeks tunggal dan indeks komposit perlindungan khusus untuk anak dan kualitas hidup anak.
 - b. Menindaklanjuti hasil perhitungan dan analisis indeks tunggal dan indeks komposit perlindungan anak dalam pelaksanaan berbagai program/kegiatan pembangunan anak.
 - c. Menyepakati indikator dan data yang digunakan untuk penyusunan indeks komposit perlindungan khusus anak dan kualitas hidup anak.
 - d. Menyediakan data dan informasi terkait dengan anak yang terintegrasi dengan instansi lainnya dan BPS.
 - e. Memperbaiki sistem dan mekanisme pengumpulan data dan informasi terkait anak yang ada di masing-masing kementerian/lembaga.
3. BPS:
 - a. Meningkatkan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam penyajian data terkait indeks tunggal dan indeks komposit perlindungan khusus untuk anak dan kualitas hidup anak.
 - b. Menyediakan data perlindungan anak yang komprehensif, termasuk perlindungan khusus untuk anak dan kualitas hidup anak, secara berkesinambungan.
 - c. Mengkaji kembali beberapa pertanyaan atau indikator yang sudah ada di Susenas tapi penggunaannya kurang optimal.
 - d. Melakukan pengambilan sampel/data Susenas dengan baik, untuk menghindari hasil yang kurang sesuai dengan kenyataan, khususnya untuk daerah-daerah yang susah dijangkau. Misalnya Papua yang mempunyai kualitas hidup anak lebih baik dibandingkan dengan di DI Yogyakarta.
 - e. Disarankan supaya blok sensus tidak perlu dilakukan secara random, melainkan harus purposive supaya dapat mewakili kondisi wilayah. Memilih kabupaten sampel sebaiknya melibatkan pemerintah provinsi yang mengetahui kondisi wilayah sebenarnya.
 - f. Mempertimbangkan indikator-indikator penting perlindungan anak yang belum tersedia datanya saat ini untuk dicakup dalam survei-survei BPS yang sudah ada. Beberapa indikator perlindungan khusus untuk anak yang perlu dipertimbangkan untuk dicakup dalam survey BPS, antara lain terkait dengan:
 - Kekerasan terhadap anak: KDRT, perdagangan anak, pelecehan seksual, dll;
 - Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - Anak yang mengalami tindak kejahatan;
 - Anak dalam situasi darurat, bencana alam, dan konflik sosial;
 - Penyandang masalah kesejahteraan sosial: Anak jalanan dan anak di panti asuhan, anak berkebutuhan khusus, dll; dan
 - Rasa aman pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori. 2005. *Perlindungan Hukum Hak-hak Anak dan Implementasinya di Indonesia pada Era Otonomi Daerah*. Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Agung, I Gusti Ngurah. 2004. *Penerapan Metode Analisis untuk Tabulasi Sempurna dan Tak Sempurna dengan SPSS*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Badan Pusat Statistik dan Organisasi Perburuhan International. 2009. *Pekerja anak di Indonesia 2009*. Jakarta: BPS.
- Bradshaw, Jonathan., Petra Hoelscher and Dominic Richardson. 2006. "An Index of Child Well-being in the European Union". *Social Indicators Research*. UK: The University of York.
- Bradshaw, Jonathan, Karen Bloor, Meg Huby, David Rhodes, Ian Sinclair and Ian Gibbs, Michael Noble, David McLennan and Kate Wilkinson. 2009. *Local Index of Child Well-Being Summary Report*. London: Communities and Local Government.
- Department of Justice. 2006. *Child Abuse Central Index Inquiry Request for Out-of-state Foster Care and Adoption Agencies*. State of California.
- International Development Law Organization (IDLO). 2008. *Indonesian Child Protection Commission (Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah/KPAID) of Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)*. Aceh.
- Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, RI. 2009. *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak*. Jakarta.
- National Commission for Child Protection (Komisi Nasional Perlindungan Anak). *Sex Trafficking of Children in Indonesia*. Jakarta.
- Report. 2004. "The Foundation for Child Development Index of Child Well-Being (CWI), 1975-2002, with Projections for 2003. A composite index of trends in the well-being of our Nation's children". Embargoed for Release, March 15, 2004. North Carolina: Duke University, Durham.
- Republik Indonesia. 2002. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Jakarta.
- Save the Children. 2008. *The Child Development Index Holding Governments to Account for Children's Wellbeing*. London: The Save the Children Fund.
- Suharto, Edi. 2007. "Social Protection For Children in Difficult Situations Lessons from Indonesia and ASEAN (Perlindungan Sosial bagi Anak dalam Situasi Sulit: Pelajaran dari Indonesia dan ASEAN)". To be presented at the International Seminar on Asian Families in Transition: Challenges For Social Work Intervention, Ciloto, West Java, 17 and 18 December 2007. West Java: Board of Education and Research, Ministry of Social Affairs, Republic of Indonesia.
- Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 2000. *Penyusunan Indikator Kesenjangan dan Keadilan Gender*. Depok.
- Hitzemann, Andrea. 2004. "Institution Building and Mainstreaming Child Protection in Indonesia. UNICEF supported Child Protection Bodies (LPAs)". *Final Evaluation Report*.
- Whitson, Donald and Cathy Savino. 2002. *A Review of Save the Children's Urban Street Children Empowerment and Support Program*. U.S. Agency for International Development or Professional Resources Group International, Inc.